

# BAB I

## **PENELITIAN KORUPSI**

---

Lembaga perguruan tinggi berdasarkan tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi harusnya menempatkan posisi terdepan dalam melakukan penelitian dan pengkajian tentang korupsi di daerah ini. Lembaga pencetak para intelektual ini harusnya lebih bisa berperan dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga ilmiah di daerah ini sesungguhnya dapat mendedikasikan dirinya dalam melakukan berbagai penelitian tentang korupsi, dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran antikorupsi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apabila penelitian tentang korupsi dapat lebih dikembangkan maka akan semakin mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung masif dalam berbagai institusi di daerah ini, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mendukung tugas dan kewajiban aparat penegak

hukum dalam membongkar korupsi melalui penyelidikan dugaan korupsi. Pengabdian pada masyarakat misalnya dapat dilakukan melalui pengembangan program sosialisasi atau penyuluhan tentang perilaku antikorupsi dan undang-undang tentang korupsi.

Penelitian tentang korupsi masih sangat jarang dilakukan para peneliti di lembaga perguruan tinggi dan lembaga ilmiah lainnya. Lembaga perguruan tinggi hingga sekarang belum mengembangkan prioritas penelitian tentang korupsi dalam pembangunan. Penelitian tentang korupsi sangat jarang ditemukan dalam lembaga-lembaga akademis daerah ini, padahal persoalan korupsi sudah sangat lama, akut, kronis, masif, dan hampir melumpuhkan proses pembangunan nasional dan daerah. Kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) bisa dikatakan belum memandang perilaku korupsi sebagai permasalahan utama pembangunan. Sesuatu kondisi yang bisa dikatakan luar biasa, relatif aneh, dan ironis. Pembuatan makalah, skripsi, tesis, dan disertasi tentang korupsi sangat jarang dilakukan. Judul-judul “karya ilmiah” di Papua jarang menyentuh wilayah korupsi. Persoalan korupsi dalam pembangunan seperti dianggap sebagai permasalahan tidak penting dan bukan prioritas untuk diteliti. Sebaliknya, topik-topik penelitian selain korupsi selalu dan terus diulang-ulang dan menjadi prioritas latar belakang penelitian, padahal hasilnya pun sering tanpa makna.

Mahasiswa atau kalangan akademisi akhirnya bisa dikatakan masih belum melihat korupsi sebagai permasalahan dalam proses pembangunan dan kehidupan

masyarakat selama ini. Peran para pendidik atau dosen menjadi sangat penting untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa korupsi telah menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat saat ini, dan bahwa hampir semua disiplin ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan korupsi. Kajian tentang korupsi dapat dilakukan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Para mahasiswa jarang sekali diberikan ilmu metode penelitian tentang korupsi, karena mungkin para pengajarnya (dosen) juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode penelitian korupsi. Menggunakan beberapa metode penelitian umum memang tidak akan cukup bagi kalangan mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang korupsi. Meneliti korupsi menggunakan metode penelitian konvensional biasa seperti metode wawancara atau survei akan sulit dilakukan, apalagi menggunakan kuesioner yang ditujukan pada responden berkaitan dengan pelaku korupsi itu sendiri.

Dalam pemahaman di mana korupsi perlu diteliti para dosen dan mahasiswa di lembaga perguruan tinggi, maka perlu diberikan materi kuliah tentang metode penelitian korupsi dan mata kuliah tentang antikorupsi. Minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dosen dan mahasiswa menyebabkan persoalan korupsi sulit diungkap dan terungkap. Lemahnya keterlibatan lembaga ilmiah dalam penelitian tentang korupsi merupakan salah satu sebab sulitnya korupsi dicegah dan diberantas serta lemahnya peran serta masyarakat dalam melakukan

pengecahan dan pemberantasan korupsi. Tentunya dengan tidak mengingkari bahwa di lembaga-lembaga ilmiah pun tidak terlepas dari perilaku korupsi. Korupsi yang sudah mengancam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah belum menjadi pusat perhatian para ilmuwan di negara ini. Korupsi masih begitu sulit diatasi dan diteliti. Perhatikan saja bagaimana sulitnya tim independen yang terdiri dari para pakar di bidangnya masing-masing bentukan Mahkamah Konstitusi (MK) RI meneliti kasus dugaan korupsi di Mahkamah Konstitusi sebagai respons dari suatu tulisan di harian *Kompas*.

Menariknya, kalangan akademisi jarang sekali melakukan penelitian tentang korupsi, padahal dasar penelitian secara metodologis (*metodologi/methodologies*) selalu berpatokan pada permasalahan pembangunan dan kehidupan, dan berusaha mencari jalan keluarnya. Penelitian tentang korupsi di kalangan akademisi daerah ini, jarang sekali, kalau tidak bisa dikatakan belum ada yang melakukannya. Dana penelitian dari berbagai departemen pusat dan daerah jarang sekali dialokasikan untuk penelitian tentang korupsi, dibanding dana penelitian lainnya. Padahal korupsi bukan merupakan masalah biasa, tetapi sudah ditetapkan menjadi kejahatan luar biasa terhadap masyarakat, pembangunan, bangsa, dan negara. Dibandingkan dengan permasalahan pembangunan lainnya, korupsi merupakan persoalan utama dan paling serius, sehingga penelitian tentang korupsi harusnya menjadi penting, mendesak, dan diutamakan, sebab apa pun visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan, dan

program pembangunan, tidak akan pernah berhasil, kalau perilaku korupsi masih masif dan sistemik. Korupsi adalah problem pembangunan sangat serius tetapi jarang diteliti kalangan akademisi. Pemerintah dan pemda jarang pula mengalokasikan dana penelitian tentang korupsi. Kenapa? Logikanya sederhana, tidaklah mungkin menyediakan anggaran untuk meneliti tindak pidana korupsi di wilayah kekuasaannya.

Korupsi sulit diteliti karena perbuatan tersebut selalu terbungkus dalam kerahasiaan. Korupsi dilakukan sangat tertutup rapih (rapi) di antara para pelakunya. Penelitian tentang korupsi tidak bisa menggunakan kuesioner seperti lazimnya penelitian di kalangan akademisi. Mana mungkin seseorang pelaku korupsi menjelaskan perilaku korupsinya pada peneliti dengan senang hati, sebagaimana bidang kehidupan atau pembangunan lainnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa meneliti korupsi di kalangan birokrasi sipil masih bisa lebih mudah dibandingkan pada kalangan aparat penegak hukum, karena hambatan psikologi yang sudah ada ditambah karakter khusus personal dan lembaga, kecuali mungkin mengambil data-data kasus dugaan korupsi masyarakat sipil di lembaga kepolisian. Transparansi Internasional Indonesia (TII, 2010) menyebutkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, legislatif, eksekutif (vertikal dan otonom), dan swasta paling banyak terjadi tindak pidana korupsi, tetapi sangat sulit untuk mengungkapkannya. Perhatikan saja tayangan televisi nasional tentang kasus pajak “Gayus Tambunan” yang melibatkan berbagai oknum